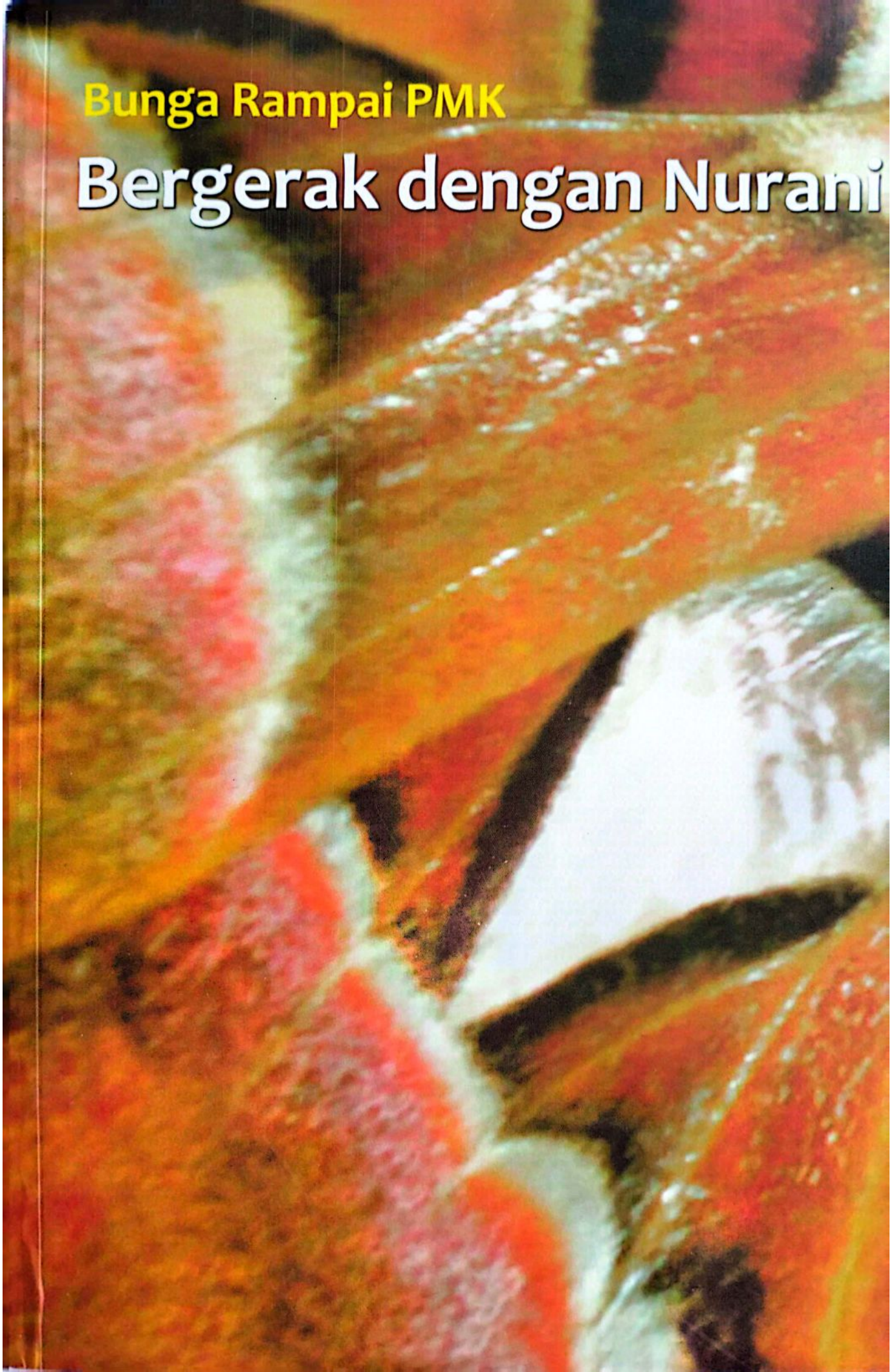


Bunga Rampai PMK

Bergerak dengan Nurani



Bunga Rampai PMK; Bergerak dengan Nurani
Gerakan Puisi Menolak Korupsi

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Kurator

Sosiawan Leak

Penyunting

Sosiawan Leak

Rini Tri Puspohardini

Desain Cover

Rony Azza

Lay Out dan Tata Letak

Rony Azza

Cetakan Pertama

Maret 2017

ISBN: 978-602-6284-56-3

Penerbit

Forum Sastra Surakarta

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
DAFTAR ISI	vii

EPISODE GERAKAN

BANYUMAS BERGERAK DALAM PUISI MENOLAK KORUPSI

<i>Agustav Triono</i>	3
-----------------------------	---

DARI BLITAR KAWENTAR; HINGGA MENYEBAR

<i>Aming Aminoedhin</i>	7
-------------------------------	---

GADIS PERKASA XENA DAN PUISI PERGERAKAN

<i>Anggoro Suprpto</i>	13
------------------------------	----

PERSAUDARAAN DAN TRANSPARANSI PMK

<i>Aris Rahman Yusuf</i>	18
--------------------------------	----

RASANYA

<i>Awan Hadi Wismoko</i>	21
--------------------------------	----

SOAL MERAYU, MEMROVOKASI, GERAKAN, DAN PENGINGAT

<i>Ayid Suyitno</i>	27
---------------------------	----

KETIKA KORUPSI JADI PUISI

<i>Bambang Widiatmoko</i>	31
---------------------------------	----

PMK, GERAKAN MENUMBUHKAN RASA MENOLAK KORUPSI

Kundari Pri Susanti 99

PUISI MENOLAK KORUPSI DI TANJUNG PINANG

Lily Siti Multatuliana 102

SISYPUS ITU BERNAMA PUISI MENOLAK KORUPSI

Marlin Dinamikanto 106

LUPAKAN PEJABAT; JADIKAN SEKOLAH SEBAGAI SASARAN

Mezra E Pellondou, S.Pd., M.Hum. 111

PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PSIKOLOGI KORUPTOR

Moh. Tamimi 116

CATATAN TIM USAHA DANA KONNAS PMK 2016

Na Dhien 120

PUISI MENOLAK KORUPSI; PERAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Najibul Mahbub 124

GAUNG LITERASI, DUKUNG ANTIKORUPSI

Nanang ES 129

LAKU NYATA MENCERMATI REALITA

Nurfatullah Ali Guntoro 135

GERAKAN PUISI MENOLAK KORUPSI; SEBUAH UPAYA MENCIPTAKAN HABITUS BARU

Ribut Basuki 139

GERAKAN BUDAYA PUISI MENOLAK KORUPSI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Riri Satria 145

GERAKAN PUISI MENOLAK KORUPSI

Mencermati fenomena korupsi yang makin merebak, para penyair Indonesia dari berbagai daerah merespon secara konkret dengan bergabung dalam Gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK). Gerakan yang mau tak mau harus dilakukan di tengah kian sistemik dan canggihnya laku korupsi. Gerakan yang mendesak digulirkan sebagai sarana memrepresentasikan seruan moral kepada masyarakat, agar secara filosofis dan praktis turut mewaspadai munculnya mental korupsi sejak dini serta mencegah perilaku korup yang lebih akut.

Gerakan Puisi Menolak Korupsi mengambil posisi sebagai gerakan kultural, melengkapi gerakan lain yang dilakukan sejumlah unsur dari berbagai lapisan berikut karakter dan alat perjuangannya (hukum, politik, agama, jurnalistik, akademik, dan lain-lain). Gerakan ini pada hakekatnya menyatu dan padu dengan semua kekuatan yang beritikad mengawal proses perjalanan masyarakat membangun bangsa dan negara yang berkeadilan dan bermartabat. Gerakan ini juga menjadi sarana bagi penyair menyatakan sikap tegas, menolak nilai-nilai hidup korup.

Gerakan PMK bersifat nirlaba, independen, dan mandiri (secara ideologi maupun ekonomi). Kemandirian ideologi dibuktikan dengan penerbitan antologi puisi yang senantiasa merujuk tema antikorupsi. Kemandirian ekonomi diwujudkan dalam melakukan iuran secara gotong-royong guna mendanai penerbitan tersebut dengan mengutamakan azas transparansi. Kemandirian juga menjadi dasar digulirkannya kegiatan PMK lainnya, yakni Road Show PMK yang dilakukan mandiri di berbagai kota, dikoordinir oleh penyair PMK di kota tersebut.

Gerakan yang idenya dilontarkan Heru Mugiarto (Penyair Semarang) tersebut telah menerbitkan sejumlah antologi puisi, merangkum karya para penyair dari berbagai daerah, usia, dan kecenderungan puitika. Setelah proses seleksi dan penyuntingan, karya-karya tersebut terbit dalam *Puisi Menolak Korupsi* (melibatkan 85 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Mei 2013), *Puisi Menolak Korupsi 2a* (melibatkan 99 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, September 2013), *Puisi Menolak Korupsi 2b* (melibatkan 98 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, September 2013), *Puisi Menolak Korupsi 3; Pelajar Indonesia Menggugat* (melibatkan 286 pelajar, Penerbit Forum Sastra Surakarta, April 2014), *Puisi Menolak Korupsi 4; Ensiklopedi Koruptor!* (melibatkan 175 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Mei 2015), serta *Puisi Menolak Korupsi 5; Perempuan Menentang Korupsi!* (melibatkan 100 perempuan penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Agustus 2015).

Sejak Mei 2013 gerakan ini juga melakukan kampanye antikorupsi bertajuk Road Show Puisi Menolak Korupsi ke berbagai wilayah di Indonesia dalam wujud pembacaan puisi, pentas seni, seminar, diskusi, orasi, lomba baca puisi, lomba cipta puisi dan lain-lain. Meski tetap terkoordinasi dengan Gerakan PMK, *road show* diselenggarakan secara otonom oleh masing-masing penyelenggara (bekerjasama dengan pihak yang berkompeten), bersifat nirlaba serta tidak terkait dengan aktivitas politik.

Penerbit Forum Sastra Surakarta



Sosiawan Leak
(Koordinator Gerakan Puisi Menolak Korupsi)

GERAKAN PUISI MENOLAK KORUPSI; SEBUAH UPAYA MENCIPTAKAN HABITUS BARU

Ribut Basuki

Dalam *Forum Group Discussion* (FGD) antara PMK (Puisi Menolak Korupsi) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Pekanbaru, 7-9 Desember 2016 saya menulis esai berjudul "Membangun Gerakan Menolak Korupsi sebagai Budaya Tandingan". Di tulisan tersebut saya menyampaikan bahwa korupsi adalah bagian dari budaya kita, karena budaya bukan hanya tentang "nilai-nilai luhur"; tetapi, dengan mengutip Raymond Williams, saya tekankan bahwa budaya merupakan '*the whole way of life*', segenap cara hidup suatu masyarakat. Ketika korupsi sudah menjadi sesuatu yang alami, misalnya dengan pemberian dan penerimaan suap di jalanan, di kantor-kantor, di dunia bisnis, dan lain-lain, maka korupsi adalah bagian dari cara hidup kita. Saya jelaskan pula bahwa korupsi sudah menjadi praktik budaya sejak jaman kerajaan hingga saat ini. Baru setelah kita menyadari bahwa korupsi memiskinkan negara karena uang rakyat masuk ke kantong pribadi para pejabat negara, kita menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang harus disembuhkan.

Kecenderungan kita untuk memberi dan menerima suap, melakukan *mark up* anggaran, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain, sudah menjadi kecenderungan kolektif. Dengan demikian, korupsi, menurut Bourdieu, adalah *habitus* kita. Menurut Bourdieu (1996), *habitus*

adalah "*systems of durable, transposable dispositions ... which generate and organize practices and representations*". Habitus adalah kecenderungan-kecenderungan yang tersistem yang menghasilkan praktik-praktik dan representasi. Karena praktik korupsi di masyarakat kita sudah tersistem sedemikian rupa, maka korupsi adalah habitus kita. Maka tidak heran jika kita menyaksikan tindakan korup terjadi sehari-hari, baik di jalanan, di pemerintahan, di parlemen, dan bahkan di pengadilan. Tertangkapnya seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di bulan Januari 2017 lalu oleh KPK adalah contoh nyata betapa korupsi sudah menjadi habitus kita.

Contoh sehari-hari dari korupsi yang sudah menjadi habitus kita, dapat kita lihat dalam praktik sehari-hari masyarakat kita. Misalnya, ada seorang polisi yang karena peningkatan kariernya dia mendapatkan tempat 'basah', katakanlah di bagian pengurusan surat-surat kendaraan. Polisi yang dari keluarga sederhana ini tiba-tiba dapat membeli tanah, membuka usaha, dan akhirnya menjadi orang kaya baru di desanya. Masyarakat melihat bahwa polisi ini orang yang berhasil, karena kariernya menanjak dan dia menjadi kaya. Kenaikan karier yang diikuti dengan kenaikan kekayaan adalah suatu hal yang biasa bagi masyarakat di sekitarnya, tanpa secara kritis mencurigai asal kekayaannya. Masyarakat tidak memperhitungkan, misalnya, berapa gaji normal si polisi? Dengan gaji sekian, mungkinkah dia mendapatkan kekayaan sebanyak itu tanpa adanya penghasilan yang tidak wajar? Masyarakat kita bahkan cenderung menghormati dan menempatkan orang seperti ini menjadi tokoh masyarakat, apalagi jika si polisi begitu pemurah dalam memberi sumbangan. Jadi ada kecenderungan bahwa ketika seseorang menduduki tempat yang 'basah', dia mengambil yang bukan bagiannya. Ada kecenderungan pola pikir bahwa menduduki tempat 'basah' adalah tanda dari keberhasilan karier. Ada kecenderungan berpikir bahwa untuk berhasil orang perlu mendapatkan tempat 'basah' agar penghasilan besar, meskipun dari korupsi. Begitulah korupsi menjadi habitus kita.

tara. Jika ada anggota yang ternyata ditangkap KPK atau secara kecil-kecilan ketahuan ketidakjujurannya, perlu ada pembicaraan terbuka untuk melakukan sesuatu terhadapnya.

Dalam hal praktik budaya, komunitas harus tetap menjaga azas keterbukaan dalam setiap informasi, baik program maupun keuangan. Praktik yang selama ini sudah dilakukan harus terus dipertahankan, karena jika tidak, maka gerakan PMK akan kehilangan esensinya. Untuk dapat mempengaruhi praktik korupsi secara eksternal, PMK harus mengembangkan praktik keterbukaan dan antikorupsi secara internal.

Dari sisi produk, PMK terus dituntut untuk terus berkarya, baik karya utamanya yaitu puisi maupun karya sampingannya yaitu pembacaan puisi, penulisan esai, sarasehan, dan lain-lain. Karya-karya ini akan perlahan-lahan membantu masyarakat memahami adanya habitus yang negatif, yaitu korupsi, dan mengubahnya menjadi positif. Di samping konsistensi dalam berkarya, perlu pula dijaga konsistensi dalam hal tema. Tema utama PMK adalah antikorupsi. Ada tema-tema lain yang cukup 'menggiurkan' untuk dibahas dalam komunitas, misalnya kekerasan terhadap anak. Keinginan seperti ini seharusnya perlu dikendalikan agar PMK tetap fokus pada temanya sendiri. Jika tidak, maka komunitas ini akan kehilangan ketajamannya sebagai bagian dari garda terdepan dalam memerangi budaya korupsi.

Kedua, untuk dapat mendorong adanya habitus baru anti-korupsi di budaya masyarakatnya secara eksternal, maka PMK perlu terus mengenalkan produk dan praktiknya di masyarakat. Kreativitas PMK untuk terus mempertajam produknya akan ditantang oleh waktu, meskipun waktu sudah menunjukkan bahwa PMK dapat bertahan beberapa tahun ini. Puisi-puisi dapat terus diproduksi atau dikemas ulang agar terus selalu hadir. Lebih dari itu, pengemasan ini perlu terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar produk-produk PMK dapat menjangkau lebih luas lagi. *Road show* yang semakin hari semakin padat adalah indikasi yang baik bahwa bola sudah menggelinding semakin

besar seperti bola salju. Ini perlu terus dipertahankan, ditingkatkan, dan diinovasi.

Praktik budaya yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan secara ekstern adalah pengenalan habitus antikorupsi itu sendiri kepada komunitas/institusi lain dan masyarakat luas. Jika bersentuhan dengan komunitas atau institusi lain, PMK harus tetap mengedepankan 'ideologi' keterbukaan dan antikorupsi, misalnya dengan memberi penjelasan mengenai batasan-batasan kerjasama PMK. Dalam kenyataannya, misalnya, produk PMK dikenal oleh KPK sehingga KPK mengundang PMK dalam kegiatannya. Namun, hingga saat ini, PMK dapat menunjukkan independensinya dengan menjaga jarak yang cukup agar kesan bahwa PMK sudah dikooptasi oleh KPK, meskipun memiliki ideologi yang sama, dapat dihindari. Dengan institusi lain, misalnya kampus, institusi bisnis atau institusi pemerintahan, godaan pemberian dana harus dipertimbangkan dengan cermat. Kerjasama dengan institusi-institusi harus terus dikembangkan agar dapat menyentuh sebanyak mungkin kelompok masyarakat, tetapi habitus PMK harus tetap mengemuka agar PMK tidak dilihat seperti komunitas yang lain, yang ingin kerjasama karena, misalnya, dana. Dengan masyarakat, PMK perlu terus bersentuhan agar tidak menjadi eksklusif. Dengan demikian, PMK dapat menularkan habitusnya.

Dari pemahaman bahwa PMK hadir dalam budaya yang memiliki habitus koruptif sebagai habitus dominan dan bahwa sebagai gerakan PMK ingin memperkenalkan habitus baru anti-korupsi, PMK akan diuji konsistensinya oleh waktu. Memang PMK tidak perlu bermimpi untuk menjadi komunitas besar dengan keinginan yang terlalu besar bagi dirinya sendiri, tetapi PMK dapat menjadi komunitas yang dihuni oleh agen-agen yang dapat menularkan habitus antikorupsi. Jika habitus itu terus berkembang dan secara perlahan mempengaruhi habitus yang dominan, maka bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain, misalnya KPK atau kampus, PMK dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam perkembangan budaya masyarakat Indonesia.

Rujukan:

- Basuki, R. (2016) *Membangun Gerakan Menolak Korupsi Sebagai Budaya Tandingan*. Kumpulan esay belum diterbitkan untuk FGD KPK-PMK. Pakanbaru: PMK.
- Bourdieu, P. (1993) *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Ed.
- Randal Johnson. U.K.: Columbia UP.
- Miles, M. (2007) *Cities and Cultures*. London: routledge.
- Storey, J. (1996) *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture*. New York:Harvester Wheatsheaf.
- Thwaites, T. et. al. (1994) *Tools for Cultural Studies: An Introduction*. Melbourne: MacMillan.

Ribut Basuki lahir 19 Juli 1965. Menyelesaikan S1 di Jurusan Bahasa Inggris, IKIP Malang (1989). Menyelesaikan S2 di Theatre Department, Arizona State University di AS (1999) dan menyelesaikan S3 di Program Studi Ilmu Susastra Universitas Indonesia (2010). Kini bekerja sebagai dosen di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, UK Petra Surabaya. Bergiat di Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) dan Petra Little Theatre. Menulis naskah dan menyutradarai pertunjukan teater, di samping menulis sejumlah puisi.